

## REFORMULASI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KARTEL

Hersen Monarchy<sup>1</sup>, Ismail Navianto<sup>2</sup>, Nurini Aprilianda<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: hersen.monarchy@gmail.com

### **Abstract**

*Criminal sanctions against perpetrators business of criminal acts cartels contained in Article 48 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices it feels that no longer effective to be applied at this time. This paper aims to find, analysis, and examine how the philosophical foundations of criminal setting replacement confinement of a criminal offense for cartel and analysis and examine how the reformulation of criminal sanctions against cartel criminal offenses in the future. This paper is based on research that uses the approach of the statute normative approach, conceptual approach, and the comparative approach. The results showed that the selection of criminal sanctions in the form of fines is expected to create a conducive business climate and keep the feeling of anxiety among foreign investors as if every step of business in Indonesia contain the threat of prison where the consequences of coercive imprisonment as efforts are still needed. Supposedly the criminal sanction of a fine replacement in the future reformulated into a supervisory or aggravate criminal sanctions and criminal use of leniency programs or with criminal surveillance.*

**Key words:** *reformulation criminal acts, cartel*

### **Abstrak**

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha tindak pidana kartel yang terdapat dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dirasa sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan pada masa ini. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan mengkaji bagaimana landasan filosofis pengaturan pidana pengganti kurungan dalam tindak pidana kartel dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *comparative approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

sanksi pidana dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 adalah sanksi pidana yang berupa pidana denda diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjauhkan perasaan was-was kalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia mengandung konsekuensi ancaman penjara dimana sebagai upaya pemaksa pidana kurungan tetap diperlukan. Semestinya sanksi pidana kurungan pengganti denda di masa mendatang direformulasi menjadi memperberat sanksi pidana dan menggunakan program *leniency* atau dengan pidana pengawasan.

**Kata kunci :** reformulasi sanksi pidana, tindak pidana kartel, kartel

### **Latar Belakang**

Memperoleh keuntungan menjadi motif utama pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Keuntungan lebih besar akan diperoleh apabila usaha tersebut bertumbuh besar yang merupakan idaman setiap pengusaha, dan oleh karenanya hukum tidak pernah melarang suatu usaha menjadi besar dan maju.<sup>4</sup>

Banyaknya pelaku usaha yang berusaha untuk menjadi pemimpin dalam bidang usahanya menimbulkan terjadinya persaingan. Persaingan dapat membawa implikasi positif maupun negatif. Tindakan anti persaingan dapat dikategorikan ke dalam dua modus, yaitu modus persekongkolan dan modus unilateral atau tindakan sepihak pelaku usaha. Persekongkolan terjadi antara dua atau lebih pelaku usaha yang melakukan perjanjian bersifat *restrictive*, misalnya konspirasi penetapan harga (*price fixing*), pembagian pasar (*market auocation*), dan persekongkolan tender (*bid rigging*). Sementara tindakan unilateral seringkali dilatarbelakangi kepemilikan posisi dominan yang pada praktiknya menimbulkan tindakan-tindakan penyalahgunaan posisi dominan berupa diskriminasi harga atau non harga, penolakan bertransaksi, jual rugi (*predatory pricing*), dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, persekongkolan antara para pelaku usaha melalui perjanjian bersifat *restrictive* tersebut lebih dikenal dengan istilah kartel.

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, **Konsep Dan Pengertian Kartel Dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta Penerapannya Di Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No.02, 2011, Hal. 25.

<sup>5</sup> HMBC Rikrik Rizkiyana dan Vovo Iswanto, **Catatan Kecil tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan (Studi Kasus di Indonesia)**”, dalam **Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)**, Centre for Finance, Investment and Securities Law, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2010), Hal. 64-65.

Kartel didefinisikan sebagai perjanjian pengaturan antara pelaku usaha dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing) dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Kartel seringkali juga timbul sebagai cara yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk merespon adanya perang harga (*price wars*) dan ketidakstabilan pasar, mempertahankan harga dan keuntungan tinggi serta eksistensi pelaku usaha di dalam pasar.<sup>6</sup>

Istilah kartel secara umum yang digunakan untuk menggambarkan setiap kesepakatan, kolusi atau konspirasi yang dilakukan para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel sendiri dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu kartel utama dan kartel lainnya. Kartel utama (*hard core cartel*) meliputi kartel mengenai penetapan harga, persekongkolan tender, pembatasan output atau pembagian wilayah. Kartel dianggap sangat berbahaya karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang bersifat sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis, yang meliputi harga, wilayah dan konsumen.

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.<sup>7</sup>

Persaingan usaha di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999). UU No.5 Tahun 1999 mengkatagorisasikan

---

<sup>6</sup> Massimo Motta, **Competition Policy: Theory and Practice**, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), Hal.3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

tindakan-tindakan anti persaingan ke dalam bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan serta penyalahgunaannya. Kartel (*cartel*) sendiri termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian yang dilarang, hal ini tertuang dalam pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dan pidana pokok yang terkait dengan kartel terdapat dalam pasal 48 ayat (1), yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Dapat di lihat di atas pidana pokok yang dikenakan hanyalah pidana denda dan pidana kurungan pengganti dimana kurungan pengganti tersebut sangatlah tidak sebanding dengan pidana denda yang dikenakan.

Sedangkan di beberapa negara sanksi pidana terhadap kartel lebih berat daripada di Indonesia, sperti dalam negara Amerika dan Jepang, Di Amerika Serikat ketentuan tentang kartel dimuat dalam *Sherman Act, Section 1*, yaitu Sanksi pidana berdasarkan perubahan terakhir pasca diundangkannya Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 2004 (Public Law 108-237, Section. 213(b)), yang berlaku efektif sejak 22 Juni 2004. Undang-undang ini meningkatkan jumlah sanksi pidana Sherman Act, dimana pidana penjara dari yang semula selama 3 tahun diubah menjadi selama 10 tahun, dan pidana denda maksimum, yang semula \$350,000 untuk individu ditingkatkan menjadi \$1,000,000 dan yang semula \$10,000,000 untuk korporasi ditingkatkan menjadi \$100,000,000.

Sedangkan di Jepang Sanksi pidana Antimonopoly Law bagi korporasi dapat berupa pidana denda maksimal ¥500 juta, sementara bagi individu selain pidana denda maksimal ¥5 juta juga dapat dikenakan baik secara kumulatif maupun alternatif, pidana penjara (imprisonment with work) maksimal 5 (lima) tahun. Tetapi dibalik beratnya sanksi pidana yang dikenakan kedua negara tersebut telah menerapkan kebijakan untuk menangani kartel yaitu kebijakan *leniency*.

*Leniency* adalah suatu sistem pembebasan, baik sebagian maupun keseluruhan hukuman, yang seharusnya diterapkan pada anggota kartel. *Leniency* diberikan kepada anggota kartel yang mengadukan atau memberikan kesaksian akan praktik kegiatan kartel kepada otoritas persaingan usaha.

*Ketentuan* mengenai larangan kartel dapat juga ditemukan dalam pasal-pasal lain yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: PASal, 5, 7, 9, 10, 12, 22 dan 24.

Mengingat kartel Walaupun tidak diketahui berapa besar kerugian konsumen sebagai akibat adanya kartel, namun kecenderungan yang terjadi memperlihatkan, bahwa kelebihan harga karena kartel cukup besar. Hal ini karena harga dari kesepakatan perjanjian kartel merupakan harga yang lebih tinggi dari harga yang tercipta karena persaingan. Pengalaman di berbagai negara, memperlihatkan bahwa harga kartel bisa mencapai 400% (empat ratus persen diatas harga pasar). Oleh karenanya tidak mengherankan bahwa kerugian akibat kartel dapat mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Lebih lanjut lagi, sebenarnya kartel bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan perkembangan perekonomian suatu bangsa, karena kartel menyebabkan terjadinya inefisiensi sumber-sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya.

Dan juga Pelaku kartel (*cartelist*) cenderung menjalankan perilakunya secara diam-diam dan oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya khusus dari otoritas persaingan usaha untuk mengungkap keberadaan kartel. Selain itu, otoritas persaingan usaha memerlukan kewenangan yang luas dan keahlian tertentu untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menjerat pelaku kartel yang

tidak kooperatif.<sup>8</sup> Untuk itu perlu diketahui apa landasan filosofis sanksi pidana dalam pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

Kesulitan yang dihadapi otoritas persaingan usaha untuk membuktikan keberadaan kartel melahirkan pemahaman hampir serupa bagi negara-negara yang telah menerapkan hukum persaingan bahwa diperlukannya kiat-kiat khusus untuk dapat mendeteksi dan menghukum pelaku kartel.<sup>9</sup> Sehingga dibutuhkan program *leniency* seperti yang telah diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang untuk mendeteksi dan memberi hukuman pelaku kartel atau dengan cara mereformulasi sanksi pidana dengan menerapkan pidana pengawasan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut, Apa landasan filosofis pengaturan sanksi pidana pengganti kurungan dalam tindak pidana kartel? Dan bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang?

Tujuan Penelitian dari tulisan ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan mengkaji bagaimana landasan filosofis pengaturan pidana pengganti kurungan dalam tindak pidana kartel dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang.

Manfaat Penelitian yang didapatkan dari penulisan ini adalah manfaat teoritis adalah untuk pengembangan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana ekonomi, menambah referensi tentang kartel dan juga mengapa diterapkan pidana pengganti kurungan bagi pelaku kartel, dan jenis sanksi pidana pengganti apa yang seharusnya dikenakan terhadap pelaku kartel.

Manfaat Praktis bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai substansi metode penelitian maupun sistematika penulisan dan berkontribusi dalam menemukan sanksi baru terhadap kartel, bagi akademisi bermanfaat untuk menambah wawasan hukum tentang kartel, bagi masyarakat bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang kerugian dan keuntungan

---

<sup>8</sup> International Competition Network (ICN), Working Group on Cartels, “Defining Hard Core Cartel Conduct Effective Institutions Effective Penalties”, materi disampaikan dalam ICN 4<sup>th</sup> Annual Conference, Bonn, Jerman, 6-8 Juni 2005, hlm. 1, <http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc346.pdf>, (6 Juli 2014).

<sup>9</sup> Christina Aryani, *Op.cit.* Hal. 52

tentang kartel dan bagi pemerintah bermanfaat untuk lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi di dalam persaingan usaha, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya tentang kartel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan penelitian normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya<sup>10</sup> yaitu dengan menganalisis landasan filosofis pengaturan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel yang terdapat dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999 , dan pembaharuan hukum-nya agar dapat mencari kepastian hukum atau aturan hukum yang layak diterapkan terhadap suatu penelitian atau perbuatan hukum.

Pendekatan Penelitian yakni dengan menggunakan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan kartel yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, risalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Sherman Act* di Amerika, *Antimonopoly Law* di Jepang. Pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep: tindak pidana, tujuan pemidanaan, pembaharuan hukum pidana, dan konsep terjadinya kartel, dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan adanya penormaan dalam aturan hukum kedepan. Pendekatan komparatif menggunakan peraturan perundang-undangan tentang kartel di Negara Amerika dan Jepang karena di Negara tersebut sanksi pidana yang dikenakan selain denda adalah penjara kemudian membandingkan peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan kartel di Indonesia, pendekatan ini dapat membantu dalam menemukan peraturan-peraturan mana yang harus diperbaiki. Adapun risalah Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 untuk membahas rumusan masalah pertama dan teori hukum yang digunakan yaitu teori kebijakan

---

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2005) Hal. 298.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 59.

hukum pidana, teori keadilan, dan teori tujuan pemidanaan yang digunakan untuk membahas rumusan masalah kedua. Analisis penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dimana bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu direduksi untuk memilah kesahihannya sebagai bahan hukum serta kesesuaiannya dengan bahan penulisan tesis ini. Bahan hukum yang sesuai langsung dideskripsikan dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan dikolaborasikan bahan hukum lain agar dianalisis untuk menggali hakikat dan informasi. Kemudian peraturan-peraturan di negara Amerika dan Jepang dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **A. Landasan Filosofis Dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana diketahui, yaitu sebagai landasan filosofis dan landasan konstitusional dalam terbentuknya suatu demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi ini, pemerintah hanya bersifat pasif yaitu sekedar memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Dalam hal memfasilitasi kebutuhan rakyat, pemerintah haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila yaitu sila ke-lima dengan menganut asas kekeluargaan. Ketentuan lain dalam aturan peralihan UUD 1945 berlandaskan juga asas perorangan, dimana penerapan asas perorangan semakin terlihat di era globalisasi sekarang ini. Hal ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat oleh karena ada dualistik sistem ekonomi Indonesia dan juga sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang notabene nya “untuk kepentingan masyarakat umum”, namun nyatanya tidak untuk kesejahteraan rakyat, mereka bergerak dengan berlandaskan asas perorangan yang pada akhirnya rakyat yang dikorbankan dan dirugikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Draft Penjelasan Rancangan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli. Hal. 22



RUU ini sangat dibutuhkan karena memberikan landasan hukum bagi perumusan kebijakan persaingan yang dilandasi oleh asas kekeluargaan (amanat UUD 1945) dengan 10 elemen dasarnya.

#### Pasal 33 UUD 1945

##### Elemen-Elemen Dasar Demokrasi Ekonomi

1. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
3. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
4. Bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah koperasi.
5. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara..
6. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasi.
7. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.
8. Prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.<sup>13</sup>

Asas kekeluargaan tersebut secara tegas menolak adanya *free fight liberalism dan praktek monopoli* yang sangat merugikan rakyat. Menjamin persaingan di pasar yang *inherent* dengan pencapaian. efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan serta membuka peluang pasar yang seluas-luasnya; menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif melalui terciptanya persaingan sehat dan yang dapat menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, menengah dan kecil; mencegah praktek-praktek monopoli yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

---

<sup>13</sup> Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Rapat Paripurna ke-1 Penjelasan Dari Panitia Khusus RUU Larangan Praktek Monopoli

dan yang didukung oleh elite politik saat itu seperti mobnas, BPPC, menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan setiap warga negara dengan cara melindungi kepentingan publik, konsumen, produsen dan juga pelaku usaha lainnya terhadap praktek-praktek monopoli yang jelas menciptakan ketidakadilan dan member kesempatan atau peluang adanya ketidakadilan terhadap rakyat banyak.<sup>14</sup>

### **A.1 Dasar Pertimbangan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli**

Bahwa perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, menghendaki kemakmuran luas masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem perekonomian seperti ini mengandung prinsip keseimbangan, keselarasan serta memberikan kesempatan berusaha yang sama, adil, merata bagi setiap warga negara.<sup>15</sup>

Kesempatan berusaha yang sama bagi setiap warga negara tergambar dalam filosofi ekonomi pasar yang menciptakan kearah sistem ekonomi pasar dimana orang per orang memiliki kesempatan yang sama. Jika demikian halnya persaingan adalah menjadi titik tumpu, hal mana persaingan tersebut harus berlangsung dalam suasana sehat dan wajar. Sebab persaingan yang sehat dan wajar akan menciptakan efisiensi usaha yang secara langsung memperbaiki struktur harga, dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif-alternatif bagi konsumen.<sup>16</sup>

Persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang mengakibatkan dikuasainya sektor produksi dan/atau distribusi atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu, sehingga menimbulkan perilaku anti persaingan yang merugikan kepentingan umum, dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.<sup>17</sup>

Perilaku anti persaingan tersebut adalah merupakan praktek-praktek monopoli yang harus dilarang. Pada saat sekarang ini praktek-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Surat Penjelasan Anggota Pengusul RUU Larangan Praktek Monopoli. Hal.2

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

praktek monopoli berlangsung dalam kehidupan perekonomian kita yang ternyata telah merugikan rakyat.<sup>18</sup>

Praktek-praktek monopoli ditimbulkan dengan perilaku usaha yang anti persaingan, serta menimbulkan struktur pasar yang tidak sehat yang pada gilirannya akan merugikan pengusaha kecil/lemah serta konsumen. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun ketentuan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli yang akan digunakan sebagai landasan hukum untuk mencegah perilaku usaha yang bersifat monopolistik tersebut.

## **A.2 Ketentuan Lain Mengenai Larangan Kartel Dalam UU No. 5 Tahun 1999<sup>19</sup>**

Ketentuan mengenai larangan kartel dapat juga ditemukan dalam pasal-pasal lain yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Pasal 5 mengenai penetapan harga yang berbunyi:
  - 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
    - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
    - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Sekilas pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal 11 yang mengatur mengenai kartel, perbedaan antara pasal 11 dengan pasal 5 adalah dalam pasal 5, pelaku usaha sepakat untuk menetapkan harga. Sedangkan pada kartel yang disepakati oleh anggota adalah mempengaruhi harga dengan jalan mengatur produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Jadi pada kartel para pelaku sepakat

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal.3

<sup>19</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, **Draft** *Loc.cit*

mengenai jumlah produksi dan atau pemasaran barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang mereka produksi.

2. Pasal 7 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

- 1) Perbedaan antara pasal 7 dengan pasal 11 adalah Pasal 7 mensyaratkan adanya penetapan harga dibawah harga pasar, sedangkan pasal 11 terdapat kesepakatan mengenai jumlah produksi dan pemasaran barang atau jasa.
- 2) Ketentuan dalam pasal 7 bertujuan untuk mematikan pesaing atau mengurangi persaingan.

3. Pasal 9 mengenai pembagian wilayah yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Rumusan pasal 9 ini memiliki persamaan dengan pasal 11. Namun tujuan perjanjian dalam pasal 9 adalah membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa. Pasal 9 tidak mensyaratkan adanya kesepakatan produksi barang dan jasa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 11.

4. Pasal 10 mengenai Pemboikotan yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
  - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
  - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Apabila kita perhatikan pasal 10 ini sekilas sepertinya tidak terdapat kesamaan dengan pasal 11. Namun, baik pasal 10 maupun pasal 11 dapat mempengaruhi jumlah barang yang beredar di pasar. Selain itu, keduanya juga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, karena baik melalui kartel maupun melalui pemboikotan selain akan mengakibatkan berkurangnya barang atau jasa di pasar juga dapat mengakibatkan naiknya harga. Perbedaan di antara keduanya adalah sarana yang digunakan, dalam kartel pelaku usaha sepakat untuk mengatur produksi, sedangkan dalam pemboikotan pelaku usaha sepakat untuk menghambat pelaku usaha lain, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan terhambatnya produksi barang atau jasa.

5. Pasal 12 mengenai *Trust* yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Perbedaan *Trust* dengan Kartel adalah bahwa perjanjian dalam *Trust* adalah membentuk suatu gabungan perusahaan dengan tetap menjaga kelangsungan perusahaan yang menjadi anggota *Trust*.

Sedangkan dalam kartel tidak terjadi gabungan perusahaan, hanya sepakat untuk melakukan koordinasi atau kolusi.

6. Pasal 22 mengenai persekongkolan yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam literatur hukum persaingan di berbagai negara, persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kartel. Namun jika dibandingkan dengan rumusan pasal 11, maka pasal 22 ini tidak mempunyai kesamaan. Persekongkolan dalam pasal 22 adalah untuk menentukan pemenang tender, sedangkan persekongkolan atau kolusi dalam pasal 11 adalah bertujuan mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi atau pemasaran barang atau jasa. Dalam hal ini persamaan esensial antara kedua pasal ini hanya terletak pada adanya perjanjian atau kesepakatan horizontal diantara para pelaku usaha pesaing yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

7. Pasal 24 mengenai Persekongkolan yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

Pasal 24 ini juga memiliki kesamaan dengan pasal 11, namun perbedaannya adalah persekongkolan dalam pasal 24 bertujuan menghambat produksi barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya. Namun perbuatan dalam kedua pasal ini samasama dapat menyebabkan diaturnya jumlah barang atau jasa yang ada di pasar.

### **A.3 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel.**

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pidana kurungan pengganti denda pada tindak kartel adalah berdasarkan dari pendapat-pendapat dan hasil rapat panitia khusus pada saat di bentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pada saat ini pendapat-pendapat dan hasil rapat tersebut sudah dirangkum dalam Risalah UU No. 5 Tahun 1999. Berikut hasil ringkasan mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pidana kurungan pengganti denda pada tindak pidana kartel yang terdapat dalam Risalah UU No. 5 Tahun 1999:

1. Tanggal 18 November 1998, Rapat Kerja ke-1 Dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Menteri Perindustrian Dan Perdagangan. Prof. DR. Ir. Rahadi Ramelan yang menjabat pada masa itu memberikan penjelasan yang menyangkut sanksi pidana yaitu lebih menyarankan bahwa penjatuhan hukuman penjara pidana maupun pidana denda itu serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Memang ada diskusi diantara kami, apakah pidana penjara bisa, apakah bukan dilaksanakan tetapi efektif atau tidak ke dalam undang-undang yang sedang kita rencanakan. Sebab itu di dalam sanksi pidana ini Pemerintah lebih mengusulkan untuk kita hanya melaksanakan hukuman pidana denda tetapi yang sangat berat.

Sebab itu disini dikenakan denda setinggi-tingginya 100 milyar dan ditambah sampai 3 kali keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran yang dilakukan. Jadi, memang karena masuknya orang kepersaingan usaha yang tidak sehat dia mendapatkan keuntungan, bukan hanya dia sudah bersalah melaksanakan pelanggaran yaitu didenda tadi dengan cukup berat 100 milyar tetapi yang berat lagi keuntungan berapa yang telah dia dapatkan karena dia membuat posisi monopoli itu, justru mekanisme memberikan hukuman pidana denda terhadap keuntungan yang sudah diperoleh ini, ini merupakan suatu tindakan pidana yang kami berpendapat bahwa ini lebih tepat, banyak sekali

mekanismenya saya kira di beberapa negara yang paling banyak menggunakan pidana yang disebabkan keuntungan, yang disebabkan posisi dominan atau pemanfaatan posisi dominan yang mengganggu persaingan usaha tersebut. Jadi selamanya sebab itu dalam saran-saran kami disini selamanya dikaitkan dengan selain denda, pidana denda adalah ditambah dengan 3 kali dari pada keuntungan yang diperoleh dari dia melanggar atau melaksanakan tadi monopoli ataupun persaingan yang tidak sehat. Jadi memang perlu kita nanti bahas penjelasan-penjelasan dalam kita merinci satu persatu akan kami sampaikan.

2. Tanggal 20 November 1998, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-1 Dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Asosiasi PULP dan Kertas Indonesia.

Anggota Pansus Ir.Ny. Arijanti Sigit Prakoeswo, menyatakan bahwa disini antara Pemerintah dan DPR-RI ada semacam friksi bahwa dari pemerintah sanksi itu lebih diberatkan kepada sanksi perdata, sedangkan beda pendapat, sedang kita menghendaki ada pidana dan perdata, mereka mengacu kepada KUHP tetapi kalau dilihat dari pada Undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi saya kira pidana masih diperkenankan.

3. Tanggal 20 November 1998, RDPU ke-2 Dengan IKAHI dan Perguruan Tinggi.

Pimpinan IKAHI Prof. Mardjono Reksodiputro memberi pendapat menurutnya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang ingin melindungi adanya perdagangan yang sehat yang pada dasarnya akan melindungi konsumen memperoleh barang yang baik dengan harga yang wajar, harus diberikan sanksi agar aturannya efektif. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini pasti tidak mudah, agar sanksi pidana itu efektif, maka tuduhan dan tuntutan tidak saja harus ditujukan kepada pengurus dari perusahaan, tetapi harus juga ditujukan kepada perusahaannya (korporasi).



Ditanggapi oleh anggota Pansus Subki Elyas Harun yang menanyakan tentang sangsi yang lebih efektif apakah sangsi penjara atau denda. Sebab ada beberapa pihak mengusulkan kalau sangsinya hukuman penjara, itu mengerikan bagi calon investor. Apalagi melihat penjara Indonesia ini seperti kandang kambing. Kalau di beberapa negara di Eropa, di Swedia itu penjaranya lebih bagus daripada rumahnya. Tapi kalau mendengar penjara di Indonesia ini. Jadi oleh karena itu didalam beberapa konsep menugas i kita juga itu denda. Ini dalam dua hal yang memiliki sangsi yang efektif itu yang mana, apa penjara atau denda atau dua-duanya.

Kemudian dijawab oleh Bapak Mardjono Reksodiputro, mengenai soal efektivitas penjara atau denda erat kaitannya, penjara itu memang efektif dalam arti menakutan dan menyebabkan orang mempunyai efek psikologis menakutkan apabila diu~cam terhadap seseorang terhadap manusia. Tetapi kalau denda, denda yang tinggi itu tentu ditujukan kepada satu perusahaan, jadi tidak bisa dibandingkan efektif yang mana karena kalau hanya manusia saja yaitu itupun tergantung, ada orang yang lebih senang masuk 3 tahun didalam penjara daripada harus dikenakan denda. Tapi maksud saya penjara barangkali adalah untuk orang/ manusia maksud saya dan denda adalah untuk korporasi.

Lalu Jawaban ditambahkan oleh anggota IKAHI, Marwan, yang mengatakan Mungkin kalau kita mau memilah masalah sanksi dahulu yang ingin saya kemukakan. Didalam Undang-undang Lingkungan mungkin Bapak-bapak masih ingat bahwa penegakan hukum lingkungan itu bisa kita lihat dari 3 aspek, yaitu penegakan dari sudut administrasinya, penegakan dari segi perdata, dan penegakan dari sudut pidana. Dan pidana ini dalam Ilmu Hukum Pidana juga dikatakan Hukum Pidana itu merupakan suatu penerapan yang bersifat ultimum remedium, yaitu yang paling akhirlah, kalau yang lain-lain sudah tidak bisa. didalam sanksi

pidana sarna dengan Undang-undang Lingkungan, kemungkinan ada dua hal yang tadi belum sempat kami koordinasikan, kalau denda itu dikaitkan dengan suatu substitusi kalau dia tidak dibayar kita mengacu tanpa mengatur misalnya disini suatu kurungan pengganti seperti hal dalam Undang-undang Psikotropika itu tidak terjadi, tetapi kemudian kita mengacu kepada bagian umum daripada KUHP, sehingga samakali tidak relevan itu denda karena orang tentu akan memilih masuk kurungan dibanding membayar denda, karena kurungan maksimum yang bisa kita tekankan pada substitusi menurut aturan umum KUHP Bab I itu hanya 6 bulan. Kalau memang mau, karena tadi kita katakan kita harus mengambil seluruh keuntungan yang ada itu atau bahwa kemudian perbuatan praktek monopoli itu tidak menguntungkan itu harus dirampas seluruh keuntungan, sehingga kemasa depan terlihat bahwa ini dari sudut *cost and benefit* tidak menguntungkan sarna sekali melakukan monopoli karena pulus yang ada itu bisa ditutup semuanya. Pertanyaan mana yang efektif antara pidana penjara dan denda, Kalau kita mengacu pada penelitian di Indonesia barangkali belum ada, mahal, tetapi di Negeri Belanda untuk tindak-tandak pidana ekonomi yang diteliti hampir seluruhnya kecuali mungkin satu, dua persen tindak pidana ekonomi itu, dan mungkin ini sudah masuk katagori tindak pidana ekonomi termasuk juga kalau di negeri Belanda Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi itu merupakan *white of the economi stability* itu hampir tidak ada yang menerapkan pidana penjara tetapi seperti kami lihat tadi itu cost and bad analisis yang dirampas adalah keuntungan dan kemungkinan keuntungan yang terjadi didalam delik tersebut, sehingga kalau untuk mengatakan mana yang lebih efektif saya kira di Indonesia kita yang belum setahu saya barangkali mari belum komplit untuk itu, tetapi dari lileratur yang saya baca di Negeri Belanda untuk tindak ekonomi itu pidana penjara itu tidak begitu efektif. Tetapi mungkin di dalam penelitian yang pernah

yang dilakukan kombinasi antara pidana percobaan, denda, material kemungkinan yang bisa dilakukan di dalam tindak pidana ekonomi itu sangat efektif sekali di dalam menangkal terjadinya tindak-tindak pidana yang monopoli ini nantinya barangkali.

4. Tanggal 23 November 1998, RDPU ke-3 Dengan PT. Semen Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, dan PT. Bogasari.

PT. Bogasari yang diwakili oleh Franky berpendapat tentang sanksi pidana, yaitu RUU ini menerapkan Hukum Pidana selain denda kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 48. Menurut pengetahuan yang ada pada kami, Undang-undang persaingan Uni Eropa tidak menerapkan sanksi pidana dalam hal pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek bisnis curang. Mungkin Sanksi Pidana dalam RUU ini perlu ditinjau lagi, karena dikhawatirkan ketentuan ini mengakibatkan para investor baik dalam negeri maupun asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia, karena sanksi pidana tersebut karena dianggap sebagai pelaku kriminal.

PT. Semen Gresik berpendapat Kalau sanksi pidana memang kami sebagai pengusaha tidak setuju Pak, karena ini kesalahannya adalah kesalahan administratif dan barangkali secara tiba-tiba saja kita menjadi lebih dari 30%. Misalnya satu pabrik tutup, sehingga kita menjadi 30% saat itu. Saat itu juga, Direksi bisa dihukum. Ini saya kira juga lebih baik didenda, kemudian dendanya masuk kepada Pemerintah untuk dimanfaatkan peningkatan komisi pengawasan usaha ataupun untuk keperluan lain dari Pemerintah.

PT. Pupuk Sriwijaya yang diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Ir. Suhadi berpendapat, tentang sanksi pidana itu sebagai sub terapi. Kalau kami sebagai pengusaha ya tentu tidak suka itu. Sudah kerja capai-capai dan sebagainya, kemudian gara-gara ini dihukum. Sementara itu undang-undang nomor 1 Tahun 1995 kita sebagai direksi persero juga akan dihukum, kemudian juga pemegang saham bisa kena sanksi juga. Jadi terlalu banyak rasanya

para pengusaha ini akhirnya sanksi-sanksi yang ada, tetapi kalau denda ya saya kira denda cukup besar saja sudah cukup berat. Kalau memang dihindari tentunya saya kira kalau ditanya para pengusaha pemegang saham, saya kira ingin menghindari, tetapi kalau karena kita adalah usaha, tetapi sanksinya juga sanksi dana. Jadi Pemerintah dari pada menghukum orang, orangnya tidak produktif, perusahaannya berhenti kan, baik orangnya dia produksi tapi kalau denda banyak uang masuk ke negara banyak. Jadi lebih banyak uang masuk negara jadi APBN cukup aman Pak.

5. Tanggal 23 November 1998, RDPU ke-4 Dengan PT. Jamsostek, LSM, dan INKUD.

Anggota Pansus Drs. Subki Elyas Harun bertanya kepada pihak Jamsostek, LSM, dan INKUD, yaitu, masalahnya disini'yang menjadi pertanyaan kita, pengusaha ini takut kalau kena penjara. Ada ekspert line dari luar negeri mengatakan metode bahwa sanksi itu cukup denda. Kalau kita cantumkan hanya 5 milyar, ada yang mengusulkan 100 milyar dendanya, jika perlu 1 triliun dendanya tetapi berupa denda bukan penjara. Sebab penjara kita ini sangat mengerikan didalamnya, jadi takut mereka itu. Tetapi kalau denda, untuk orang kaya berapa saja mereka bayar. Tetapi dalam konsep kita dua-duanya, penjara sekian puluh tahun, dan denda. Atas pertimbangan supaya efektif betul Undang-undang ini akan berlaku. Dari pertimbangan ini apakah dari LSM atau dari mana, yang mana sebenarnya yang terbaik. Apakah dua-duanya, atau denda saja, sebab pikiran ini sarna-sarna kuat. Ada yang mengatakan kalau di luar negeri itu senang di penjara, sebab dikatakan kalau penjara di Swedia itu lebih bagus dari rumahnya. Jadi kalau dipenjara tidak apa-apa, tetapi ada dipihak lain seperti Negara berkembang seperti Indonesia ini lebih baik didenda 10 milyar dari pada penjara 1 hari. Jadi atas pertimbangan tersebut mana yang terbaik bagi kita untuk mencantumkan masalah satu ini apakah denda saja atau dua-duanya.

LSM menjawab Pertama adalah sanksi administratif, kedua perdata, dan ketiga pidana. Dalam perjalanannya kalau melihat draft dari Pansus itu, angka seperti Rp. 3 milyar, dsb itu relatif cepat sekali akan tidak ada artinya apa-apa. Yang kedua, kalau kemudian sanksi itu tidak kunjung segera dilaksanakan, maka menurut saya pemberian sanksi yang membuat jera itu tetap penting juga dengan bentuk kurungan itu.

6. Tanggal 23 November 1998, Rapat Kerja ke-5 Dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pada rapat kerja ke-5 ini masuk ke dalam pembahasan sanksi pidana, Pihak Pemerintah yaitu bapak Menteri Prof.Dr.Ir. Rahadi Ramelan Menjelaskan mengenai sanksi pidana ini, ada hal-hal yang perlu kita dalami bersama, karena kita inginnya Pemerintah membebaskan masalah ini langsung kepada pidana denda yang setinggi-tingginya juga dikaitkan dengan masalah kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan oleh tindakan terhadap monopoli atau persaingan yang tidak sehat ini.

Kemudian oleh anggota Pansus (panitia khusus) Yanto S.H menanggapi Kita memahami apa yang disampaikan Pemerintah, tetapi sesungguhnya kita juga punya maksud bahwa pelaku pelanggaran di bidang pelaku-pelaku ekonomi ini tidak terbatas pada pidana denda, karena kita mengharapkan dengan pidana penjara itu ada shock terapi untuk jera begitu, kalau sekedar denda mungkin dia akan berhitung-hitung kalau mungkin dari dendanya ini masih ada keuntungan dia akan melakukan juga praktek itu, tapi kalau ada ancaman pidananya meskipun itu barangkali dalam pidana itu nanti bisa kita formulasikan sebagai satu alternatif terakhir atau mungkin setelah seseorang itu melakukan hal yang sama, setelah dilakukan denda mengulang lagi, denda mengulang lagi. tetapi kalau tidak dipidana ya barangkali di masyarakat cukup banyak dirasakan dan dilihat, pelaku penyelundupan ya

berulangkali melakukan terus, karena hanya disita saja apa yang diselundupkan, tidak ada tindakan pidana yang tegas.

Ditambahkan oleh anggota Pansus Drs. Taifuqorohman S.H menjelaskan, Sebetulnya penggagas dari RUU ini bermaksud dengan mencantumkan pidana penjara serta denda dengan Rp. 5 milyar itu tadinya dikandung maksud agar dengan jumlah ini dengan besarnya pidana dan denda ini bisa ada *dicturn effect* terhadap upaya-upaya akan melakukan praktek monopoli, ternyata bukan *dicturn* terhadap praktek monopoli tetapi. *dicturn* juga terhadap investasi, begitu menurut Pemerintah. Kalau melihat ancaman begitu, orang mau investasipun takut, jadi saya kira mari kita bicarakan hal ini jangan sampai karena UU ini nanti orang pada lari semua, karena daripada aku kena penjara, seperti yang dikatakan kalau dipenjara di Inggris sih'masih enak katanya, tapi kalau di daerah Indonesia ini mereka ya mikir 3 kali, bahkan 5 kali, akhirnya daripada kena penjara

Ditambahkan lagi oleh anggota Pansus yakni Erwin Syahril S.H berpendapat memang pada waktu UU Perbankan dibuat itu kita mendapat masukan yang paling bagus. Jika nanti sanksi pidana ini ada, maka kita berikan sanksi pidana itu tidak setinggi-tingginya, tetapi ada yang serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya dan kemudian kumulatifnya bukan dengan "dan" tapi "dan atau" sehingga ada pilihan. Jadi saya setuju ini sebelum masuk ke Panja, kita pending dulu kita lobykan, karena ini agak banyak menyangkut perspektif yang lebih luas, sehingga kita bisa berfikir lebih tenang dan melahirkan hasil yang lebih jelas daripada nanti kita panjakan juga hasilnya hitam putih, tapi kalau kita pending ini kemudian kita lobikan barangkali pada waktu masuk ke Panja sudah ada gambaran, jadi sebelum masuk ke Panja kita pending dulu dan kemudian kita lobikan dulu tentang sanksi ini, karena tuntutan kepada sanksi ini begitu menggebu-gebu di satu pihak,

tetapi di sisi lain ada ketakutan yang begitu tinggi di pihak lain. Jadi kita harus juga memikirkannya secara lebih matang.

Kemudian ditanggapi lagi oleh Pemerintah, Seperti tadi Anggota terhormat menyampaikan dan ini salah satu isu sentral yang menjadi debat publik dalam RUU ini. Selain masalah-masalah yang kita hadapi dengan berbagai sanksi pidana ini memang trend pada saat ini sanksi pidana kurungan untuk masalah ekonomi itu tidak ada, walaupun di perundang-undangnya ada, tetapi hampir tidak pernah pengadilan memutuskan ada sanksi pidana kurungan dalam masalah ekonomi. Itu yang pertama. Jadi sebagaimana usul tadi ini kita pending, oleh karenanya kami minta persetujuan dari Pak Menteri pengertian dipending di sini adalah kita dahului dengan pertemuan atau loby yang kita atur nanti akhir dari pertemuan kita untuk membahas tentang sanksi pidana ini. Dapat disetujui pak ?

Yang kedua yang kita hadapi saat ini adalah usaha, jadi bentuk hukum apa PT, CV, sehingga kalau kita ingin menerapkan sanksi pidana kurungan kita harus tahu siapa yang harus dikurung, apakah direksinya, pemegang sahamnya, komisaris, kalau sudah *go public* bagaimana. Jadi saya sangat setuju bahwa masalah ini kita lobikan kita pending seperti halnya dua masalah yang kita hadapi yang satu sudah lewat yang satu masih perlu ada pemantapan sehingga saya juga punya waktu untuk bertemu dalam rangka loby dengan para Anggota yang saya hormati. Terima kasih saya setuju untuk dipendingkan, dilobikan.

Ditanggapi lagi oleh Erwin Syahril S.H Memang ada kecenderungan bahwa dalam dunia usaha kecenderungan untuk memberikan hukuman pidana itu dikurangi, tetapi bukan berarti bahwa kalau kita sampel di seluruh dunia maka mayoritas masih pidana. Jadi jangan kita kemudian terpuruk kepada ketakutan bahwa kita harus tiru yang itu, kita juga ingin bahwa negara ini lebih bagus, orang berusaha lebih enak, jadi jangan kemudian kita

tiru orang yang sudah maju, kita yang masih amburadul seperti begini kemudian kita tiru yang mau bagus tapi kemudian kita tinggalkan basis kita yang lagi amburadul dan penjarahan kita benarkan misalnya, kan kita mendengar bahwa ada orang seorang menteri malah berkata kalau mau menjarah jangan lebih dari 5% itu artinya apa, mbok jangan korupsi lebih dari 30% lah, gitu kan, masa kita diamin itu Pak Menteri. Cobalah Pak Menteri juga jangan kita disugesti dengan tadi itu, karena kalau kita sampel seluruh dunia barangkali dalam hukum perdagangan seluruh dunia barangkali boleh pak. Itu memang hukum pidana sanksi pidana itu ada, karena memang para pengusaha inilah yang menghancurkan fundamental ekonomi di suatu negara.

7. Tanggal 1 Desember 1998, Rapat Kerja ke-6 Dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil kesimpulan rapat kerja ke-6 ini adalah Tanggapan Pemerintah yang menyangkut ini adalah disamping sanksi yang lain, ada sanksi administrasi dan sanksi tambahan. Hal itu tidak terlalu bersinggungan, hampir sama dengan konsep Pemerintah. Tetapi yang menyangkut "sanksi pidana penjara", tanggapan Pemerintah yang menyangkut ini. tidak kita gunakan perkataan "sanksi pidana penjara" tersebut. Tetapi penekanannya adalah terhadap kita lebih perbesar tentang "sanksi pidana denda" tersebut. Sedangkan Pansus masih berpendapat bahwa soal sanksi pidana penjara ini atau kurungan, tetap untuk di masukkan di dalam RUU ini. Apakah nanti diperlakukan menjadi ada salah satu pasal yang menyangkut substitusi hukuman denda dinyatakan adalah kurungan yang jika apabila denda yang ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, substitusi pada hukuman kurungan yang juga waktunya kita tetapkan di dalam ROO ini. Tanggapan Pemerintah, dalam soal ini sebenarnya juga tidak terlalu keberatan. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus, bagaimana jika ini dimasukkan di dalam RUU. Punya dampak



yang besar terhadap pelaku usaha atau investor asing, investor luar yang akan menanamkan modal di negeri Indonesia. Kemudian diserahkan juga kepada Panja sekaligus dikonsultasikan dengan Mahkamah Agung.

Pemerintah menanggapi, kelihatannya orang itu takutlah kalau dipenjarakan, supaya jera. Memang di beberapa negara sanksi pidana penjara ini masih ada, hanya tinggal di beberapa negara yang belum mengadakan perubahan dari Undang-undang Monopoli atau Undang-undang Monopolinya yang sudah lama. Dan walaupun itu ada, jarang sekali atau hampir tidak ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Anti Monopoli mereka atau Persaingan Sehat mereka. Timbul pemikiran apakah justru, kalau masih ingin tetap adanya sanksi pidana penjara, itu sebagai hukuman tambahan atau subsider, tentu ini Perlu dikonsultasikan. Karena biasanya hukuman penjara itu merupakan hukuman yang utamanya, sedangkan subsider itu dendanya. Mengingat hal tersebut kami tadi menyepakati untuk dikonsultasikan dengan Mahkamah Agung.

8. Tanggal 1 Februari 1999, Raker Pansus ke-8 tentang Laporan Panja, Pengambilan keputusan Panja.

Setelah RUU ini dibahas baik dalam forum rapat kerja Pansus maupun Panja menghasilkan ketetapan tentang sanksi pidana dalam pasal 48 yaitu Pidana Pokok terhadap tigatingkatan terhadap pelanggaran UU ini.

Tingkat I serendah-rendahnya Rp. 25 miliar, setinggi-tingginya 100 miliar atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 6 bulan.

Tingkat II serendah-rendahnya Rp. 5 milyar setinggi-tingginya Rp. 25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan.

Tingkat III serendah-rendahnya 1 miliar setinggi-tingginya Rp.5 miliar atau pidana pengganti selama-lamanya 3 bulan.

Laporan Pansus juga dijelaskan dalam hal penentuan sanksi pidana pokok berupa denda, Pansus telah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung yang pada prinsipnya sependapat dengan usulan dari Dewan tentang pencantuman pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda.

Pemilihan sanksi berupa pidana denda diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjauhkan perasaan was-was dikalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia mengandung konsekuensi ancaman penjara. Meskipun demikian sebagai upaya pemaksa agar putusan lembaga peradilan dapat dilaksanakan tetap diperlukan substitusi pidana kurungan.

Demikian hasil ringkasan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam Risalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dilihat dari hasil ringkasan diatas tidak salah dengan berbagai dasar filosofis bahwa pengambilan keputusan sanksi denda dikenakan dengan substitusi pidana kurungan pengganti denda untuk pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 bagi pengusaha yang melanggar pasal 4, pasal 9 sampai dengan 14, pasal 16 sampai dengan 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 dimana pasal untuk kartel yakni pasal 11 termasuk didalamnya. Adapun penerapan sanksi pidana tersebut tetap menjadi kewenangan pejabat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya, sehingga KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan di Indonesia, sejatinya memiliki kewenangan sebatas tindakan administrasi. Tetapi apabila dilihat dari rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, pada masa saat ini sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum tersebut.

Penggunaan pidana kurungan pengganti denda bagi pelaku usaha yang melakukan kartelisasi dengan keuntungan yang telah diperoleh dari hasil kartel

dirasa sudah tidak efektif lagi, dengan keadaan zaman yang canggih saat ini, dimana kebanyakan laporan keuangan dan berbagai macam kegiatan administrasi sudah menggunakan computer, pelaku usaha yang melakukan kartel mungkin saja melakukan penggelapan laporan keuangan hasil dari kartel, sehingga pada saat dijatuhi hukuman maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda yang mana pidana kurungan pengganti denda tersebut dalam perundang-undangan memang hanya bisa maksimal 6 bulan dan batas minimalnya adalah 1 hari.

Dalam hal ini pelaku usaha kemungkinan besar akan lebih memilih dikenakan pidana kurungan pengganti denda daripada membayar denda yang minimal Rp. 25 Miliar. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum pidana atau reformulasi sanksi pidana dalam tindak pidana kartel khususnya penggunaan pidana kurungan pengganti denda tersebut.

## **B. Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kartel Di Masa Mendatang**

Ada 2 alternative reformulasi sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel yang sesuai dengan teori kadilan dan teori tujuan pemidanaan, pertama memperberat sanksi pidana dalam tindak pidana kartel dan menerapkan *leniency*, kedua dengan reformulasi pidana kurungan pengganti dengan pidana pengawasan.

### **B.1 Sanksi Pidana Diperberat dan Menerapkan *Leniency*.**

*Leniency* merupakan istilah umum untuk menggambarkan suatu sistem pembebasan, baik sebagian maupun keseluruhan hukuman, yang seharusnya diterapkan pada anggota kartel.

Di Amerika Serikat penanganan kartel di sana mengacu pada perspektif hukum pidana, Sebagaimana diatur dalam Section.1 *Sherman Act*, praktik kartel merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana denda maksimal USD 100 juta jika dilakukan oleh korporasi, dan pidana denda maksimal USD 1 juta dan atau

pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun bagi individu yang melakukan atau terlibat dalam kartel.<sup>20</sup>

Kebijakan di Amerika Serikat mengartikan *leniency* sebagai: “*not charging such a firm or such an individual criminally for the activity being reported*”. Berdasarkan pemahaman tersebut, hanya dikenal satu jenis *leniency* di Amerika Serikat yaitu yang berupa pembebasan (amnesti) dari sanksi pidana. *Leniency* diberikan kepada anggota kartel yang mengadukan atau memberikan kesaksian akan praktik kegiatan kartel kepada otoritas persaingan usaha. Dengan menjadi pemohon pertama yang mengajukan *leniency*, pelaku kartel dapat memperoleh pembebasan dari ancaman sanksi pidana *Sherman Act*.<sup>21</sup>

Sedangkan di Jepang Sanksi pidana Antimonopoly Law bagi korporasi dapat berupa pidana denda maksimal ¥500 juta, sementara bagi individu selain pidana denda maksimal ¥5 juta juga dapat dikenakan baik secara kumulatif maupun alternatif, pidana penjara (*imprisonment with work*) maksimal 5 (lima) tahun. Pengertian individu di sini adalah meliputi karyawan, agen, perwakilan, atau pekerja lainnya dari korporasi bersangkutan.<sup>22</sup> Jepang memberikan dua kemungkinan penegakan hukum kartel yaitu melalui perspektif hukum administratif dan dalam kasus-kasus khusus dapat dilakukan melalui persektif hukum pidana. Dalam hal menempuh perspektif administratif, *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) akan mengeluarkan *cease and desist order* dan perintah pembayaran denda administratif. Adapun sesuai ketentuan yang diatur dalam *Antimonopoly Law* jenis *leniency* yang dikenal di Jepang adalah berupa pembebasan dan pengurangan dari sanksi denda administratif. Namun demikian,

---

<sup>20</sup> Christina Aryani, **Studi Komparatif Leniency Program Untuk Pembuktian Kartel Dalam Antitrust Law Di Amerika Serikat Dan Antimonopoly Law Di Jepang**, (Depok: FH UI, 2012). Hal. 61-62.

<sup>21</sup> Sanksi pidana dalam ketentuan ini adalah berdasarkan perubahan terakhir pasca diundangkannya Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 2004 (Public Law 108-237, Section. 213(b)), yang berlaku efektif sejak 22 Juni 2004. Undang-undang ini meningkatkan jumlah sanksi pidana *Sherman Act*, dimana pidana penjara dari yang semula selama 3 tahun diubah menjadi selama 10 tahun, dan pidana denda maksimum, yang semula \$350,000 untuk individu ditingkatkan menjadi \$1,000,000 dan yang semula \$10,000,000 untuk korporasi ditingkatkan menjadi \$100,000,000.

<sup>22</sup> Japan, **Antimonopoly Law**, Article. 89, Article 92, dan Article. 95. Ketentuan ini merupakan versi amandemen tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010, dimana lamanya pidana penjara maksimum pelanggaran kartel ditingkatkan dari sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun.

jenis *leniency* di Jepang sejatinya juga mencakup pembebasan (amnesti) dari sanksi pidana, yaitu dalam hal JFTC memilih untuk tidak mengajukan klaim tuduhan pidana kepada Penuntut Umum yang membawa konsekuensi tidak dapat dimulainya proses penuntutan pidana dan dijatuhkannya sanksi pidana. Kebijakan untuk tidak melakukan klaim tuduhan kriminal tersebut diatur dalam JFTC *Criminal Accusation Policy*.<sup>23</sup>

Di Indonesia sanksi pidana dalam tindak pidana kartel diatur dalam pasal 48 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 dimana isi dari pasal tersebut adalah diancam pidana denda serendah rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dengan beratnya sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana kartel di Amerika Serikat dan Jepang maka kebijakan program *leniency* yang merupakan kebijakan untuk membantu membuktikan tindak pidana kartel menjadi efektif untuk diterapkan dan selaras dengan tujuan pidana yang pada saat ini sudah bergeser ke perlindungan kepada masyarakat bukan lagi sebagai pembalasan. Secara umum, tujuan umum dari penggunaan hukum pidana dan ppidanaan (politik kriminal) adalah upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hal ini berdasarkan pada teori tujuan ppidanaan yang dikemukakan Van Hamel di atas, bahwa sanksi pidana yang diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang bukan hanya sebagai pembalasan saja melainkan sanksi pidana disana sudah mempunyai unsur prevensi khusus dalam *social defence* yaitu memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya hal ini terbukti dari saknsi pidana denda bagi korporasi serta pidana denda dan pidana penjara bagi individu yang telah diterapkan di kedua Negara tersebut, dapat memperbaiki terpidana yaitu dengan cara menerapkan kebijakan *leniency* yang telah dijelaskan di atas, mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki dengan

---

<sup>23</sup> Christina Aryani, *Op.cit.* Hal.64.

cara member pidana penjara bagi individu yang terlibat dalam kartel, dan mempertahankan tata cara tertib hukum.<sup>24</sup>

Dan untuk mencegah dan membantu membuktikan adanya kegiatan kartel maka kebijakan *leniency* sudah memiliki unsur prevensi umum dalam tujuan pemidanaan yaitu Pengaruh pencegahan disini berarti kebijakan *leniency* lah yang membuat banyaknya pengaruh pencegahan, dan juga berkaitan dengan unsur yang menakutkan dalam prevensi khusus bahwa sanksi yang berat dapat membawa pengaruh pencegahan dalam tindak pidana, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>25</sup>

Untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana kartel di Indonesia, dan juga sebagai upaya pembaharuan hukum positif di Indonesia khususnya hukum pidana maka sebenarnya Indonesia juga bisa menerapkan program *leniency* tersebut, tetapi sanksi pidana haruslah disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan pasar yang berada di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang teori tujuan pemidanaan yang telah dibahas di bagian A diatas juga, bahwa pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 memiliki beberapa kelemahan yang membuat tujuan pemidanaan itu sendiri tidak tercapai sehingga perlu untuk melakukan pembaharuan hukum terkait sanksi pidana dalam pasal 48 tersebut.

Bentuk kebijakan program *Leniency* yang ada di Amerika Serikat dan Jepang dapat menjadi bentuk alternative baru bagi peraturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan hukum dan pemidanaan bahwa program *leniency* lebih efektif dalam mengatasi atau menangani tindak pidana kartel.

Pada saat UU No. 5 Tahun 1999 ini dibuat seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana kartel ini adalah upaya untuk melindungi para pelaku usaha dari cap criminal, dan investor asing maupun investor dalam negeri tidak takut untuk

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, *Op.Cit.*Hal. 29

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18

berinvestasi di Indonesia, tetapi untuk mendukung persaingan usaha yang sehat di Indonesia, sebenarnya penerapan kebijakan *leniency* tepat untuk mendukung persaingan sehat tersebut, hal ini selaras dengan tujuan dari kebijakan *leniency* yang telah disebutkan diatas, tetapi untuk mendukung kebijakan *leniency* agar berjalan efektif, maka penekanan terhadap sanksi pidana harus diperbesar sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan ini para pelaku usaha akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan kartel dan apabila terlibat kartel maka dapat dengan segera menggunakan program *leniency* sebagai alat untuk memperingan sanksi pidana yang akan dikenakan. Untuk itu kedepannya diharapkan peraturan sanksi pidana dalam tindak pidana kartel dapat direformulasi sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat bukan hanya pembalasan melainkan untuk perlindungan masyarakat juga.

## **B.2 Reformulasi Pidana Kurungan Pengganti Denda Dengan Pidana Pengawasan**

Dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini.

Oleh karena itu, ide dasar diwujudkannya pidana pengawasan sebagai alternatif jenis pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dalam hukum pidana di Indonesia seharusnya selaras dengan kedua aspek dari tujuan pemidanaan tersebut. dalam pidana pengawasan, pelaku tindak pidana dengan kriteria tertentu (perbuatan dan keadaannya) diputuskan untuk dikembalikan pada masyarakat dengan pengawasan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari pejabat pengawas untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, terdapat upaya guna menghindarkan atau melindungi pelaku tindak pidana tersebut dari kemungkinan pengaruh buruk yang bisa terjadi bila ditempatkan di dalam penjara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, (Bandung: Alumni, 1985). Hal. 155.

Di samping hal tersebut di atas, pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan tetap diberi kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupannya secara normal baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara dengan tetap berpijak pada konsistensi untuk melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.<sup>27</sup>

Dengan ketentuan demikian dapat diasumsikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat secara dini tercegah dari dampak *stigmatisasi* sebagai orang jahat yang sedikit banyak dapat mempengaruhinya dalam melangsungkan kehidupannya di masyarakat.

Dengan direformulasikannya pidana kurungan pengganti denda ke pidana pengawasan, maka pencapaian sanksi pidana efektif yang diinginkan oleh anggota DPR untuk tindak pidana kartel dapat tercapai sesuai dengan landasan filosofis pidana kurungan pengganti denda yang telah dikemukakan di atas.

Walaupun belum ada peraturan yang menjelaskan secara spesifik terhadap pidana pengawasan di Indonesia dimana sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP yang berlaku sekarang ini hanya mengatur Hukuman pidana, namun sebagai upaya pembaharuan hukum khususnya hukum pidana dan untuk memajukan hukum positif Indonesia di Masa mendatang, sekiranya pidana pengawasan sangat cocok mengganti sanksi pidana kurungan pengganti denda terhadap tindak pidana kartel. Sebenarnya bukan hanya pada tindak pidana kartel saja melainkan pidana pengawasan pantas diterapkan untuk tindak pidana ringan di Indonesia.

## Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian tentang reformulasi sanksi pidana dalam tindak pidana kartel, maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Dasar filosofis sanksi pidana dalam pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 adalah bahwa pemilihan sanksi berupa pidana denda diharapkan akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta

---

<sup>27</sup> Slamet Siswanto, **Pidana Pengawasan**, *Op.cit.* Hal. 97.



menjauhkan perasaan was-was dikalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia yang mengandung konsekuensi ancaman penjara. Sebagai upaya pemaksa agar putusan lembaga peradilan dapat dilaksanakan tetap diperlukan substitusi pidana kurungan. Tetapi tujuan pemidanaan dalam 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 adalah berupa pembalasan, sedangkan tujuan pemidanaan sekarang ini telah mengalami pergeseran yang mana tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan saja, melainkan juga untuk perlindungan masyarakat.

- b. Reformulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana kartel di masa mendatang, direformulasi kembali sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu dengan 2 cara alternatif. Pertama sanksi pidana dalam tindak pidana kartel diperberat seperti yang berada di negara Amerika Serikat dan Jepang kemudian menggunakan program *leniency* tetapi tetap dengan melihat keadaan perekonomian di Indonesia, Dan kedua sanksi pidana kurungan pengganti denda dalam pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 direformulasi menjadi pidana pengawasan dan pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Christina Aryani, 2012, **Studi Komparatif Leniency Program Untuk Pembuktian Kartel Dalam Antitrust Law Di Amerika Serikat Dan Antimonopoly Law Di Jepang**, FH UI. Depok.
- HMBC Rikrik Rizkiyana dan Vovo Iswanto, 2010, **Catatan Kecil tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan (Studi Kasus di Indonesia)", dalam Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)**, Centre for Finance, Investment and Securities Law, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Massimo Motta, 2004, **Competition Policy: Theory and Practice**, Cambridge University Press, Cambridge.
- Muladi, 1985, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**.
- Risalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, **Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Perkom No. 4 Tahun 2010.
- United States. **Sherman Act**. 15 U.S.C §§ 1.
- \_\_\_\_\_. *Clayton Act*. 15 U.S.C § 1.
- \_\_\_\_\_. **Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 2004**, Public Law No. 108-273.
- \_\_\_\_\_. **Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 2004 Extention Act**. Public Law No. 111-30.
- Japa,. *Antimonopoly Law, Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade*. Act No. 54 of 1947.

\_\_\_\_\_ **The Code of Criminal Procedure. Act No. 131 of 1948.**

\_\_\_\_\_ **Civil Code. Act No. 89 of 1896.**

\_\_\_\_\_ **Code of Civil Procedure. Act No. 109 of June 26, 1996.**

### **Jurnal Hukum**

Gunawan Widjaja, **Konsep Dan Pengertian Kartel Dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta Penerapannya Di Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No.02, 2011.

Irna Nurhayati, **“Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori Dan Praktik”**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No.02, 2011.

M. Udin Silalahi, **“Circumstantial Evidence In The Substantiation Mechanism Against Cartel Infringements In Indonesia”**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No.02, 2011.

Slamet Siswanto, **Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**, Jurnal Hukum, 2007.

### **Artikel Internet**

Andi Saputra, **“Lawan Pengusaha, KPPU Kalah 3 Kali Berturut-turut di Meja Hijau”**,  
<http://www.detiknews.com/read/2011/09/08/073649/1717874/10/lawan-pengusaha-kppu-kalah-3-kaliberturut-turut-di-meja-hijau>, (15 April 2014).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, **Draft Pedoman Kartel.pdf**,  
<http://kppu.go.id>. (12 April 2013).